

**KPU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

**Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Parit Malintang, 31 Desember 2021

Sekretaris,



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
*Il. Korong Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung
Telp / Faximile (0751) 675354*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parit Malintang, 31 Desember 2021



Darlis, S. Sos, MM

NIP. 19680501 199803 1 004

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 247.239.998,-.

Realisasi Belanja Negara pada semester II TA 2021 adalah sebesar Rp. 5.490.519.653,- atau mencapai 99.44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.521.465.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.232.435.161,- yang terdiri dari: Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 4.231.989.161,-, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 446.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 4.232.435.161,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5.785.300.940,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.785.300.940,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. (113.100.422,-) dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (5.898.401362,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 7.346.915.768,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (5.898.401.362) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (195.864.126),- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.968.148.881,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 4.220.799.161,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

CALK HIBAH KPU KAB. PADANG PARIAMAN

Dana Hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerima hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman tahun 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/NPHD/KESBANGPOL/X/2019 dan Nomor : 385/PR.07-NK/1305/KPU-Kab/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (NPHD terlampir).

- Hibah sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan Hibah yang bersifat tahun jamak (multi years) yang jadwal pelaksanaannya pada tahun 2019 , 2020 dan 2021.

- Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerima dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2020.

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah dirubah dengan PMK 99/PMK.05/2017, ada tahapan pengesahan yang harus dilaksanakan setelah NPHD ditandatangani, yaitu :

a. Penerbitan Nomor Register, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah dengan Nomor : 393/KU.07-SD/1305/Sek-Kab/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019. Dan telah ditetapkan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri dengan Nomor Register Hibah 27SAR3XA sesuai dengan surat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Nomor : S-1892/WPB.03/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

b. Pembukaan Rekening Hibah, menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 11 November 2019 Nomor : 406/KU.03.2/SD/1305/Sek-Kab/XI/2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dan Surat KPPN Padang Nomor : S-2190/WPB.03/KP.01/2019 tanggal 14 November 2019 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah Langsung Atas Nama KPU Kab. Padang Pariaman yaitu " RPL 010 PDHL KPU PADANG PARIAMAN UNTUK 2YSAR3XA ".

c. Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA. Berdasarkan PMK Nomor : 99/PMK.05/2017 pasal 26 dan pasal 27, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang ke dalam DIPA, penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

d. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja Dalam Bentuk Uang. Pengesahan pendapatan hibah dan pengesahan belanja hibah ke KPPN Padang melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor 00309 tanggal 31 Desember 2019, dimana pengesahan pendapatan sebesar Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengesahan belanja sebesar Rp. 370.805.848,-(Tiga ratus tujuh

puluh juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah). Sisa yang belum dilakukan pengesahan belanja sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi saldo akhir pada tahun 2019 dan akan jadi saldo awal tahun 2020 sesuai dengan PMK 99/PMK.05/2017 pasal 28 (1) *dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.*

e. Posisi Akhir Penutupan Kas per 31 Desember 2019 adalah Saldo Akhir Rp. 1.129.194.152,-. Dimana Saldo Bank Rp. 1.128.500.000,-, uang di brankas Rp. 694.152,-.

Pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Padang Pariaman belum melakukan SP2HL. Pada tanggal 11 Maret 2020 diterima transfer hibah tahap ke 1 Rp. 9.400.000.000, sehingga total uang Hibah yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah Rp. 10.900.000.000. Total Realisasi bulan Desember Tahun 2019 dan Tahun 2020 sampai bulan Juni 2020 adalah Rp. 1.553.509.729. Saldo akhir di Bank per 30 Juni 2020 Rp. 9.325.890.000 dan uang tunai di Brankas Rp. 20.600.271.

f. Selama Proses Tahun 2020 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan SP2HL yang terdiri dari Saldo Awal Sebesar Rp. 1.129.194.152,- (Dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat seratus lima puluh dua rupiah), Pendapatan Hibah sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), Total keseluruhan Anggaran Hibah Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 24.629.194.152,- (Dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat seratus lima puluh dua rupiah), dan Proses Pengajuan Belanja Hibah terdiri dari dua Tahap, SP2HL Tahap Pertama Nomor 00122 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 5.620.477.714 (Lima milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah), SP2HL Tahap Kedua Nomor 00122 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 16.720.578.701,- (Enam belas milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah) sehingga total Realisasi Belanja Hibah yang sudah di SP2HL ke KPPN adalah sebesar Rp.

22.341.056.415,- (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah),- selama Tahun 2020. Saldo akhir di Bank per 31 Desember 2020 Rp. 2.288.137.737 dan uang tunai di Brankas Rp. 125.872,-.

g. Sisa Anggaran Hibah Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.288.137.737 yang dipergunakan untuk kegiatan Tahapan Tahun 2021 yang telah diajukan SP2HL No 00048 sebesar Rp. 2.275.130.774 tanggal 26 April 2021 dan sisa anggaran sebesar Rp. 13.006.226 yang telah dikembalikan dan di setor ke Kas Negara Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Untuk data Akhir pengajuan SP4HL No 00066 sebesar Rp. 13.006.226 telah diajukan ke KPPN tanggal 17 Mei 2021 dan telah di Void KPPN. Diajukan kembali ke KPPN Padang SP4HL no 00182 sebesar Rp. 13.006.226 tanggal 27 Desember 2021 dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) tanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor SP2D 210100500370001 Tahun 2021 sebesar Rp. 13.006.226.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | TA 2021 | | % thd Angg | TA 2020 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | - | - | 0.00 | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | - | 0.00 | - |
| BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 22,541,432,000 | 2,528,935,423 | 11.22 | 2,360,637,495 |
| Belanja Barang | B.4 | 2,952,233,000 | 2,937,315,730 | 99.49 | 26,233,175,221 |
| Belanja Modal | B.5 | 27,800,000 | 24,268,500 | 87.30 | 19,700,000 |
| Belanja Bantuan Sosial | B.6 | - | - | 0.00 | - |
| JUMLAH BELANJA | | 25,521,465,000 | 5,490,519,653 | 21.51 | 28,613,512,716 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | - | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.2 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.3 | - | 2,288,137,737 |
| Piutang Bukan Pajak | C.4 | - | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | C.5 | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | C.6 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | C.7 | - | - |
| Belanja Dibayar di Muka | C.8 | - | - |
| Pendapatan yang Masih harus Diterima | C.9 | - | - |
| Persediaan | C.10 | - | 367,690,420 |
| Jumlah Aset Lancar | | - | 2,655,828,157 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | C.11 | - | - |
| Tagihan Penjualan Angsuran | C.12 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | C.13 | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.14 | 2,266,279,000 | 2,266,279,000 |
| Peralatan dan Mesin | C.15 | 2,275,535,250 | 2,350,243,580 |
| Peralatan dan Mesin Belum Diregister | | - | - |
| Gedung dan Bangunan | C.16 | 1,616,544,000 | 1,616,544,000 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.17 | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | C.18 | - | - |
| Konstruksi dalam pengerjaan | C.19 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.20 | (1,926,369,089) | (1,542,073,005) |
| Jumlah Aset Tetap | | 4,231,989,161 | 4,690,993,575 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tidak Berwujud | C.21 | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.22 | 506,075,037 | 399,748,207 |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.23 | (505,629,037) | (399,654,171) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 446,000 | 94,036 |
| JUMLAH ASET | | 4,232,435,161 | 7,346,915,768 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.24 | - | - |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.25 | 11,636,000 | - |
| Pendapatan Diterima di Muka | C.26 | - | - |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | C.27 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 11,636,000 | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 11,636,000 | - |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.28 | 4,220,799,161 | 7,346,915,768 |
| JUMLAH EKUITAS | | 4,220,799,161 | 7,346,915,768 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 4,232,435,161 | 7,346,915,768 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|---|---------|-----------------|------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | - | 120,000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | 120,000 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 2,540,571,423 | 2,360,637,495 |
| Beban Persediaan | D.3 | 49,633,500 | 924,066,497 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 2,717,233,018 | 25,497,048,968 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 112,244,212 | 60,516,118 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 58,205,000 | 21,315,000 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | 307,413,787 | 302,555,650 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | - | - |
| Beban Lain-Lain | D.11 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 5,785,300,940 | 29,166,139,728 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (5,785,300,940) | (29,166,019,728) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.12 | | |
| Surplus Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar | | 183,099,998 | 102,000,999 |
| Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | | 367,690,420 | - |
| Jumlah Suplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | | (184,590,422) | 102,000,999 |
| Defisit Selisih Kurs | | - | - |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 71,490,000 | 3,094,000 |
| Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | 1,228,048 |
| Jumlah Suplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 71,490,000 | 1,865,952 |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | (113,100,422) | 103,866,951 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (5,898,401,362) | (29,062,152,777) |
| POS LUAR BIASA | D.13 | | |
| Pendapatan PNB | | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (5,898,401,362) | (29,062,152,777) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2021 | 2020 |
|--|---------|-----------------|------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 7,346,915,768 | 4,946,689,067 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (5,898,401,362) | (29,062,152,777) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | (195,864,126) | 1,525,018,766 |
| EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI | | | |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN | | | |
| KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | - | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | - | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | - | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | E.3.4 | (182,857,163) | - |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.5 | - | 1,554,655,000 |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | E.3.6 | - | (29,636,234) |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.7 | (13,006,963) | - |
| JUMLAH | | (195,864,126) | 29,937,360,712 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 2,968,148,881 | 2,400,226,701 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5 | (3,126,116,607) | - |
| EKUITAS AKHIR | E.6 | 4,220,799,161 | 7,346,915,768 |

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum
Padang Pariaman**

| | |
|--------------------|---|
| <i>Dasar Hukum</i> | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Pelaporan Keuangan No. 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Entitas berkedudukan di Jalan Padang Baru No. 11 Parit Malintang. |
| <i>Entitas dan</i> | |
| <i>Rencana</i> | |
| <i>Strategis</i> | |

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen dengan visi ***“ Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ”***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

- Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- **Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.**
- **Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.**
- **Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:**
 - a) **Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);**
 - b) **Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);**
 - c) **Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.**
- **Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.**

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

| Uraian | 2021 | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH REVISI |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Jasa | - | - |
| Pendapatan Lain-lain | - | - |
| Jumlah Pendapatan | - | - |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 2,411,451,000 | 2,541,432,000 |
| Belanja Barang | 704,290,000 | 2,952,233,000 |
| Belanja Modal | 0 | 27,800,000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja | 3,115,741,000 | 5,521,465,000 |

Realisasi

Pendapatan Rp.
247.239.998,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 247.239.998,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang tidak ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021

| Uraian | 2021 | | |
|----------------------|----------|--------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan Jasa | - | - | - |
| Pendapatan Lain-lain | - | 247,239,998 | - |
| Jumlah | - | 247,239,998 | - |

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari pendapatan lelang Surat Suara dan kotak bilik suara berbahan Karton dengan Salinan Risalah Lelang Nomor : 357/08/2021 tanggal 19 November 2021 senilai Rp. 30.199.999,- dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 29 November 2021 dengan NTPN : 51A7355DEE07P33J dan Lelang Bilik Suara Almunium dengan Risalah Lelang Nomor :424/08/2021 tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp.152.899.999,- dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 28 Desember 2021 dengan NTPN : 44F7F8N3DOCUOIKP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI 31 DESEMBER 2021 | REALISASI 31 DESEMBER 2020 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Jasa | - | - | 0.00 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 247,239,998 | 102,000,999 | 0.00 |
| Jumlah | 247,239,998 | 102,000,999 | 0.00 |

Realisasi Belanja

Negara Rp.

5.490.519.653,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada semester II TA 2021 adalah sebesar Rp. 5.490.519.653,- atau 99.44% dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.521.465.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja semester I TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021

| Uraian | 2021 | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 2,541,431,000 | 2,528,935,423 | 99.51 |
| Belanja Barang | 2,952,233,000 | 2,937,315,730 | 99.49 |
| Belanja Modal | 27,800,000 | 24,268,500 | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Total Belanja Kotor | 5,521,464,000 | 5,490,519,653 | 99.44 |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah | 5,521,464,000 | 5,490,519,653 | 99.44 |

Dibandingkan dengan Semester II TA 2020, Realisasi Belanja Semester I TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar (74.00%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan belanja pegawai, karena adanya Pengurangan pembayaran gaji tukin ke- 13 dan tukin ke- 14 tahun 2021 di Bulan Juni 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2021 dan TA 2020

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | 2,528,935,423 | 2,360,637,495 | 7.13 |
| Belanja Barang | 2,937,315,730 | 26,233,175,221 | (88.80) |
| Belanja Modal | 24,268,500 | 19,545,000 | 24.17 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 5,490,519,653 | 28,613,357,716 | (80.81) |

Belanja Pegawai

Rp.

2.528.935.423,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.528.935.423,- dan Rp. 2.360.637.495,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

imbangan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 7.13 % dari Semester II TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat pegawai.
2. Adanya kenaikan berkala pegawai.
3. Adanya tambahan anak dari pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI SEMESTER I TA 2021 | REALISASI SEMESTER I TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2,528,935,423 | 2,360,637,495 | 7.13 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS | - | - | - |
| Belanja Honorarium | - | - | - |
| Belanja Lembur | - | - | - |
| Belanja Vakasi | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 2,528,935,423 | 2,360,637,495 | 7.13 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 2,528,935,423 | 2,360,637,495 | 7.13 |

Belanja Barang

Rp.

2.937.315.730,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.937.315.730,- dan Rp. 26.233.175.221,- Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 mengalami penurunan (99.49 %) dari Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang persediaan tahun 2020 karena adanya pengurangan anggaran akibat Covid - 19. Sedangkan pada tahun 2020 peningkatan terjadi pada semua belanja disebabkan oleh sisa dana Hibah yang telah berjalan.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 338,700,500 | 129,913,000 | 160.71 |
| Belanja Barang Non Operasional | 2,272,691,474 | 23,905,153,355 | (90.49) |
| Belanja Jasa | 108,390,044 | 1,192,111,251 | (90.91) |
| Belanja Pemeliharaan | 112,244,212 | 60,616,118 | 85.17 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 55,656,000 | 21,315,000 | 161.11 |
| Belanja Barang Persediaan | 49,633,500 | 924,066,497 | (94.63) |
| Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 2,937,315,730 | 26,233,175,221 | (88.80) |
| Pengembalian Belanja | | | |
| Jumlah Belanja | 2,937,315,730 | 26,233,175,221 | (88.80) |

Belanja Modal Rp. B.5 Belanja Modal

24.268.500,-

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.268.500,- dan Rp. 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2021 tidak ada kenaikan dengan Semester II TA 2020 yaitu 87.30 %, tidak ada kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal untuk penambahan di tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI SEM I 2021 | REALISASI SEM I 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24,268,500 | 19,545,000 | 0.00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Lainnya | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 24,268,500 | 19,545,000 | 0.00 |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 24,268,500 | 19,545,000 | 0.00 |

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi TA 2021

tidak ada kenaikan dan penurunan karena Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan pembelian tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | Naik (Turun) % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 0 | 0.00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0.00 |

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 24.268.500,- dan Rp. 0,- . Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin II TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan peralatan dan mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Komputer Unit | 14,965,000 | 0 | 0.00 |
| Peralatan Komputer | 4,434,000 | 16,970,000 | 0.00 |
| Peralatan Kantor | 4,869,500 | 0 | 0.00 |
| Peralatan Elektronik | 0 | 0 | 0.00 |
| Rumah Pintar Pemilu | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 24,268,500 | 19,545,000 | 0.00 |
| Pengembalian | - | - | 0.00 |
| Jumlah Belanja | 24,268,500 | 19,545,000 | 0.00 |

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2020. Dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan penambahan pembangunan gedung kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Gedung Tempat Kerja | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 0 | 0.00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0.00 |

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | Naik (Turun) |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| Belanja Modal Jaringan | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 0 | 0.00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0.00 |

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Semester I TA 2020.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020 sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan belanja bantuan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | REALISASI T.A. 2021 | REALISASI T.A. 2020 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | 0 | 0 | 0.00 |
| | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 0 | 0 | 0.00 |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0.00 |

diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Jenis | TH 2021 | TH 2020 |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Pendapatan Jasa Pelatihan | - | - |
| Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | - | - |
| Jumlah | - | - |

Persediaan Rp. 0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 367.690.420,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan telah diajukan Lelang ke KPKNL Padang dengan Nomor Risalah lelang 424/08/2021 tanggal 27 Desember 2021. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Jenis | TH 2021 | TH 2020 |
|--------------------------------------|---------|--------------------|
| Kotak dan Bilik Suara | - | 367,690,420 |
| Kotak Suara Konversi BA 99 Ke BA 076 | - | - |
| Bilik Suara Konversi BA 99 Ke 076 | - | - |
| Persediaan Lainnya | - | - |
| Jumlah | - | 367,690,420 |

Semua jenis persediaan pada tanggal 27 Desember 2021 telah dilaksanakan Lelang Bilik Suara berbahan Aluminium oleh KPKNL Padang.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran

Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,-. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Keterangan | TH 2021 | TH 2020 |
|--|---------|---------|
| Uang Tunai | - | - |
| BPG 010 KPU KAB PADANG PARIAMAN 651896561411000 | - | - |
| Jumlah | - | - |

Kas di Bendahara C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Penerimaan

Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Keterangan | TH 2021 | TH 2020 |
|--------------------------|---------|---------|
| Uang Tunai | - | - |
| Bank BRI Cabang Pariaman | - | - |
| Jumlah | - | - |

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0,- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 2.288.137.737,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. 0,-. Kas lainnya dan setara kas ini berasal dari sisa dana Hibah Pilkada 2019 yang masih bersisa yang belum direalisasikan dan akan digunakan untuk tahun 2021. Kas sebesar Rp. 2.288.011.865,- terdapat di Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dengan nomor rekening RPL 010 PDHL KPU PADANG PARIAMAN UNTUK 2YSAR3XA Acc. 1700.0101.00178.5 dan uang tunai sebesar Rp. 125.872,-. Nilai hibah yang diberikan pada tahun 2020 adalah Rp. 23.5000.000.000,-. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Keterangan | TH 2021 | TH 2020 |
|--|---------|---------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | - | 2,288,137,737 |
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | - | - |
| Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan | - | - |
| Jumlah | - | 2,288,137,737 |

Piutang PNBP Rp. 0,- C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | TH 2021 | TH 2020 |
|-----------------|---------|---------|
| Piutang PNBP | - | - |
| Piutang Lainnya | - | - |
| Jumlah | - | - |

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| No | Nama | TH 2021 | TH 2020 |
|----|---------------|---------|---------|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| 6 | | - | - |
| | Jumlah | - | - |

Bagian Lancar
TPA
Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| No | Nama | TH 2021 | TH 2020 |
|--------|------|---------|---------|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. 0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|-------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0.00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0.00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0.00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | | |
| | - | | - |

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Jenis | TH 2021 | TH 2020 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Pembayaran Internet | - | - |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | - | - |
| Pembayaran Sewa Gedung Kantor | - | - |
| Jumlah | - | - |

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0,-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah

Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| No | Debitur | TH 2021 | TH 2020 |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| 6 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| No | Debitur | TH 2021 | TH 2020 |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 | | - | - |
| 2 | | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| 5 | | - | - |
| Jumlah | | - | - |

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Semester II TA 2021

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jk Panjang | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|--------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0.00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | 0.00% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 0% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | | |
| | - | | - |

Tanah
Rp. 2.266.279.000,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.266.279.000,- dan Rp. 2.266.279.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai

aset tetap tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 2,266,279,000 |
| Mutasi tambah: | 0 |
| Pembelian | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| Revaluasi aset | - |
| Penyitaan pengadilan | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 2,266,279,000 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester II TA 2021

| No | Luas | Lokasi | Nilai |
|----|----------|--|---------------|
| 1 | 3.645 m2 | Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang | 2,266,279,000 |
| 2 | | | - |
| 3 | | | - |
| 4 | | | - |
| | | Jumlah | 2,266,279,000 |

Peralatan dan

Mesin

Rp. 2.275.535.250,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 2.275.535.250,- dan Rp. 2.275.535.250,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 2,283,168,832 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 0 |
| Hibah Barang | 0 |
| Transfer Masuk | 0 |
| Koreksi tambah | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Penghentian dari penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 2,283,168,832 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | (1,757,762,882) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 525,405,950 |

Gedung dan
Bangunan
Rp. 1.616.544.000,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 1.616.544.000,- dan Rp. 1.616.544.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | 1,616,544,000 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembangunan tambahan ruang kelas | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 1,616,544,000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | (168,606,207) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 1,447,937,793 |

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp. 0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan jaringan teknologi informasi | - |
| Mutasi kurang: | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | - |

Aset Tetap
Lainnya
Rp. 0,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|---|-------------------|---|
| Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor | - | 0 |
| Potongan pajak yang belum disetor | - | 0 |
| Utang kepada Pihak ketiga lainnya | 11,636,000 | Utang Makan Pegawai Bulan Desember 2021 |
| Total | 11,636,000 | |

**Pendapatan
Diterima di Muka
Rp. 0,-**

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | Jumlah |
|--------------|----------|
| | - |
| | - |
| | - |
| Total | - |

**Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp. 0,-**

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

| | |
|--|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 0 |
| Mutasi tambah: | |
| - | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| - | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 0 |

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (1.926.369.089)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. (1.926.369.089),- dan Rp. Rp. (1.944.536.459),- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai.bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Semester II TA 2021

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 2.275.535,250 | 1.757.762,882 | 517.772,368 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 1.616.544,000 | 168.606,207 | 1.447.937,793 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah | 506.075,037 | 505.629,037 | 446,000 |
| | Akumulasi Penyusutan | 4.398.154,287 | 2.431.998,126 | 1.966.156,161 |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud Rp. 0,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | |
|--|--|
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | |
| Mutasi kurang: | |
| Saldo per 31 Desember 2021 | |
| Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021 | |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | |

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud Semester II TA 2021

| Uraian | Nilai Perolehan |
|---------------|-----------------|
| | 0 |
| | 0 |
| Jumlah | 0 |

Aset Lain-Lain Rp. C.22 Aset Lain-Lain

506.075.037,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 506.075.037,- dan Rp. 399.748.207,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---------------|
| Saldo per 31 Desember 2020 | 506,075,037 |
| Mutasi tambah: | |
| - reklasifikasi dari aset tetap | - |
| Mutasi kurang: | |
| - penggunaan kembali BMN yang dihentikan | - |
| - penghapusan BMN | - |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 506,075,037 |
| Akumulasi Penyusutan | (505,629,037) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 446,000 |

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya

Yang Belum

Diregister Rp. 0,-

C.23 Aset Lainnya Yang Belum D register

Saldo Aset Lainnya Yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp.

(505.629.037,-)

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 505.629.037,- dan Rp. 399.202.061,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Aset Tak Berwujud | | | |
| Software | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 |
| Aset Lain-lain | 506,075,037 | 505,629,037 | 446,000 |
| Jumlah | 506,075,037 | 505,629,037 | 446,000 |

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0,-

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 11.636.000,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 11.636.000,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| Uraian | TH 2021 | TH 2020 |
|--|---------|---------|
| Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Jumlah | - | - |

Ekuitas

Rp.

4.220.799.161,-

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.220.799.161,- dan Rp. 7.346.915.768-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp.

183.099.998,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 183.099.998,- dan Rp. 102.000.999,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Pendapatan Jasa | 0 | 0 | 0 |
| Pendapatan Lain-lain | 183,099,998 | 102,000,999 | 0 |
| Jumlah | 183,099,998 | 102,000,999 | 0 |

Beban

Pegawai Rp.

2.540.571.423,

-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.540.571.423,- dan Rp. 2.360.637.495,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Gaji | 2,540,571,423 | 2,360,637,495 | 8 |
| Beban Tunjangan-tunjangan | 0 | 0 | 0 |
| Beban Honorarium dan Vakasi | - | - | 0 |
| Beban Lembur | - | - | 0 |
| Jumlah | 2,540,571,423 | 2,360,637,495 | 8 |

*Beban
Persediaan
Rp.
49.633.500,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.633.500,- dan Rp. 924.066.497. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 49,633,500 | 924,066,497 | (95) |
| Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | - | - | 0 |
| Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges | - | - | 0 |
| Beban Persediaan Bahan Baku | - | - | 0 |
| Beban Persediaan Lainnya | - | - | 0 |
| Jumlah | 49,633,500 | 924,066,497 | (95) |

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa Rp.
2.717.233.018

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.717.233.018,- dan Rp. 25.497.048,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kenaikan dari beban bahan, honor output kegiatan dan beban barang non operasional lainnya serta beban jasa profesi dan jasa lainnya. Hal ini dikarenakan telah berlangsungnya tahapan pemilu 2019. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2020 dan 2019

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 214,069,500 | 182,055,500 | 17.58 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 24,000 | 140,000 | 0.00 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 98,080,000 | 113,640,000 | (13.69) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 11,128,000 | 16,273,000 | (31.62) |
| Penanganan Pandemi CIVID-19 | 29,799,000 | 0 | #DIV/0! |
| Beban Bahan | 24,637,700 | 2,637,500 | 100.00 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 1,178,560,000 | 14,582,300,000 | 100.00 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 1,049,569,774 | 7,112,603,280 | (85.24) |
| Penanganan Pandemi CIVID-19 | 2,975,000 | 2,294,563,437 | (99.87) |
| Beban Langganan Listrik | 26,630,044 | 34,171,251 | (22.07) |
| Beban langganan Telepon | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Belanja Modal BLU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beban Langganan Air | 0 | 0 | 100.00 |
| Beban Sewa | 22,800,000 | 22,800,000 | 100.00 |
| Beban Jasa Profesi | 0 | 0 | 100.00 |
| Beban Jasa Lainnya | 58,960,000 | 26,820,000 | 100.00 |
| Beban Jasa - Penanganan COVID-19 | 0 | 1,108,320,000 | 100.00 |
| Beban Jasa Aset Ekstrakomtable Peralatar | 0 | 725,000 | 100.00 |
| Jumlah | 2,717,233,018 | 25,497,048,968 | (89.34) |

Beban
Pemeliharaan
Rp.
112.244.212,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 112.244.212,- dan Rp. 60.516.118,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan pada pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---|-------------|------------|-------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 24,592,090 | 5,578,000 | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 87,422,122 | 54,940,118 | 0.00 |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan | 230,000 | 0 | 100.00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan Lainnya | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 112,244,212 | 60,516,118 | 85.48 |

Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
58.205.000,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.205.000,- dan Rp. 21.315.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi dan tahapan Pemilu yang sudah dimulai yang meningkat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 35,405,000 | 21,315,000 | 66.10 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 16,200,000 | 0 | 100.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 6,600,000 | 0 | 100.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0 | 0 | 100.00 |
| Jumlah | 58,205,000 | 21,315,000 | 173.07 |

Beban Barang D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------|
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0.00 |

Beban
Bantuan
Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester II Tahun 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2021 | TH 2020 | % NAIK (TURUN) |
|--|----------|----------|----------------|
| Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0.00 |

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp.
307.413.787,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 307.413.7870,- dan Rp. 302.555.650,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 268,075,369 | 264,814,531 | 98.7836115 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 37,468,046 | 37,468,046 | 100 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | - | - | 0 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 1,870,372 | 273,073 | 14.5999299 |
| Jumlah Penyusutan | 307,413,787 | 302,555,650 | 98.419675 |
| | | | 0 |
| Beban Amortisasi Software | - | - | 0 |
| Beban Penyusutan aset lain-lain | - | - | 0 |
| Jumlah Amortisasi | - | - | 0 |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 307,413,787 | 302,555,650 | 98 |

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2020 | TH 2019 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------|----------|----------------------|
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0.00 |

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.
183.099.998,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Penjualan Alat Angkut Darat | 0 | 0 | 0.00 |
| Penjualan Alat Kantor | 0 | 0 | 0.00 |
| Selisih Kurs | 0 | 0 | 0.00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *) | 0 | 0 | - |
| Pendapatan dari Pemindahantangan BMN Lainnya | 183,099,998 | 102,000,999 | - |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 183,099,998 | 102,000,999 | 0.00 |

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering

Rp. 0,-

terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember 2021 dan 2020

| URAIAN | TH 2021 | TH 2020 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|---------|---------|----------------------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0.00 |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.

7.346.915.768,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.346.915.768,- dan Rp.4.946.689.067,-.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

(Rp.

5.897.265.355,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp. 5.897.265.355,-) dan (Rp. 29.062.152.777,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp. 0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

**Persediaan Rp.
0,-**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

| Jenis Persediaan | Koreksi |
|------------------|---------|
| Barang Konsumsi | - |
| Suku Cadang | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Atas

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

**Reklasifikasi
Rp.
(182.857.163),-**

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang diakibatkan karena koreksi dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Reklasifikasi persediaan untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (182.857.163),- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Semester II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Koreksi Aset

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

**Tetap Non
Revaluasi Rp.
0,-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. (29.636.234)-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II Tahun 2021

| Jenis Asot Tetap | Nilai Koreksi |
|---------------------|---------------|
| Peralatan dan Mesin | - |
| Gedung dan Bangunan | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Lain-Lain Rp. (13.006.963),-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. (13.006.963),- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

| Jenis Beban | Jumlah Koreksi |
|--------------------|---------------------|
| Koreksi Beban | - |
| Koreksi Pendapatan | - |
| Koreksi Piutang | - |
| Koreksi Kewajiban | - |
| Koreksi Hibah | (13,006,963) |
| Jumlah | (13,006,963) |

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.968.148.881,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.968.148.881,- dan Rp. 29.937.360.712,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|--|----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (247,239,998) |
| Ditagikan ke Entitas Lain | 3,215,388,879 |
| Transfer Masuk | - |
| Transfer Keluar | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| Jumlah | 2,968,148,881 |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (247.239.998),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 3.215.388.879,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-, terdiri dari:

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|----|---------------------|--------------|-------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | | - |
| 3 | Persediaan | | - |
| | Jumlah | | - |

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-, dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang Semester II Tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk Semester II Tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | | | Rp - |
| 2 | | | Rp - |
| Total Pengesahan | | | Rp - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah | | | Rp - |
| Jumlah | | | Rp - |

Ekuitas Akhir

Rp.

4.220.799.161,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.220.799.161,- dan Rp. 7.346.915.768,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan rekonsiliasi internal sesuai Berita Acara Nomor : 12/RT.01.2/BA/Sek-Kab/1305/VI/2021 tanggal 31 Desember 2021. dan Rekonsiliasi eksternal dengan KPPN sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR-151843/WPB.03/KP.010/2021 tanggal 10 Januari 2022. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran bersaldo nihil, nilai tersebut sudah sesuai dengan data dukung sebagai berikut :

A. Buku Kas Umum per 31 Desember 2021 bersaldo
NIHIL

B. Rekening Koran per 31 Desember 2021 bersaldo
NIHIL

C. Penelusuran nilai UP, dengan rincian KKP Rp. 20.000.000,- dan UP Murni Rp. 30.000.000,-.

SPM GU NIHIL nomor 00183 tanggal 27 Desember 2021 atas UP Murni bernilai Rp. 4.170.000,-. SPM GU NIHIL nomor SPM 00185 tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp. 21.325,-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 sebesar Rp. 247.239.998.00 adalah Pengembalian Honor Pokja Penyusunan Produk Hukum, Pokja Pertanggung Jawaban Keuangan, dan Pokja SPIP untuk bulan April dan mei Tahun 2020 oleh BPK RI Tahun 2020, Penjualan Ex Logistik Pemilu Tahun 2020 dan Bilik Suara Berbahan Alumunium dengan rincian Penerimaan Bukan Pajak

(PNBP) dengan rincian sebagai berikut :

Tindak lanjut Pemeriksaan BPK Pada KPU kabupaten Padang Pariaman tentang pembayaran Honorarium Kelompok Kerja telah melakukan penyetoran uang kelebihan ke Kas Nedara sebesar Rp. 64.140.000.00 Tanggal 24 Februari 2021 dengan NTB : BN2413135738 dan NTPN C844696UI8E2A80AHO sebesar Rp. 64.140.000.00

Akun Persediaan terdapat saldo senilai Rp. 0, nilai tersebut merupakan saldo Bilik Suara Almunium sejumlah 3.400 unit yang mana telah dilakukan Lelang Bilik suara di KPKNL Padang dengan Salinan RISALAH LELANG Nomor : 424/08/2021 tanggal 27 Desember 2021, Bilik Suara Eks Pemilu/Pemilihan di kabupaten bahan almunium sejumlah 4717 Kilogram dengan Harga Lelang Rp. 152.899.999,- (Seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Pembeli Yovie Karnedi NIK 1301040707890004 Wiraswasta. Adapun Bukti Penerimaan Negara yaitu Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya tanggal 28 Desember 2021 sesuai dengan NTB : 000000567079 dan NTPN : 44F7F8N3DOCUOIKP sebesar Rp. 152.899.999.

Adapun Lelang Eks Surat Suara dan Kotak Suara Berbahan Karton Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan berat total 6.931 kilogram dengan Harga Lelang Rp. 30.199.999 (Tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Pembeli Yovie Karnedi NIK 1301040707890004 Wiraswasta. Adapun Bukti

Penerimaan Negara yaitu Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya tanggal 22 November 2021 sesuai dengan NTB : 000000399686 dan NTPN : 51A7355DEE07P33J sebesar Rp. 30.199.999.

CALK SISA HIBAH KPU KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. 0,-. Kas lainnya dan setara kas ini berasal dari sisa dana Hibah Pilkada 2019 yang masih bersisa yang belum direalisasikan dan akan digunakan untuk tahun berikutnya.

Penerimaan selama Tahun 2020 adalah Rp. 23.500.000.000,-. Dengan Pegesahan Pendapatan Hibah Langsung SP2HL nomor 00119 Tanggal 18 September 2020 adalah Rp. 23.500.000.000,- Pengeluaran Belanja selama Tahun 2020 SP2HL 00122 / 28 September 2020 Rp. 5.620.477.714 dan SP2HL 00184 / 31 Desember 2020 Rp. 16.720.578.701,-. Sisa Saldo Akhir Rp. 2.288.137.737,-. Berdasarkan BKU dan Rekening Koran , diantaranya saldo RPL Rp. 2.288.011.865,- terdapat di Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dengan nomor rekening RPL 010 PDHL KPU PADANG PARIAMAN UNTUK 2YSAR3XA Acc. 1700.0101.00178.5 dan BKU tunai sebesar Rp.125.872,-. Saldo Kas Rekening dengan jumlah sebenarnya Rp. 2.288.137.737,-.

Tahun 2021 Sisa Anggaran Hibah yang diajukan SP2HL No 00048 tanggal 26 April 2021 melalui e-spm KPPN Padang sebesar Rp. 2.275.130.774,- dengan saldo Akhir Anggaran Hibah sebesar Rp. 13.006.963,- yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang disetor langsung ke Bank Nagari Lubuk Alung tanggal 26 April 2021.

KPU Kabupaten Padang Pariaman Mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) dengan No 00066 sebesar Rp. 13.006.963 tanggal 17 Mei 2021 melalui e-spm KPPN Padang sekaligus penutupan Rekening Hibah KPU Kabupaten Padang Pariaman di Bank Nagari Lubuk Alung tanggal 17 Mei 2021. Dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Pariaman Mengajukan VOID ke KPPN terkait SP4HL yang telah diajukan ke KPPN untuk dibatalkan dan agar dibuat Koreksi terkait dengan Akun yang telah diajukan sebelumnya 431133 di ganti ke Akun 311911 dan telah diajukan kembali SP4HL dengan No 00182 sebesar Rp. 13.006.963,- tanggal 27 Desember 2021 melalui e-spm KPPN Padang dan KPPN telah mengeluarkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) sebesar Rp. 13.006.963,- Nomor SP2D 210100500370001 tanggal 29 Desember 2021. Berdasarkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor 00182T/656141/2021 tanggal 27 Desember 2021 KPU Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan oleh KPPN Padang dengan nomor SP2D 210100500370001 tanggal 29 Desember 2021 Tahun 2021 dengan Saldo Akhir adalah Rp. 0,00

Laporan Neraca BMN Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 Aset Tetap terdapat pada akun tanah sudah bersertifikat milik KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor 23 dan luas tanah 3.645 m² senilai Rp. 2.266.279.000,- Peralatan dan mesin senilai Rp. 2.275.535.250, Gedung dan Bangunan senilai Rp. 1.616.544.000 dan .

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 (Rp. 1.926.369.089,-). Aset lain-lain dengan saldo Rp. 506.075.037,- dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya senilai Rp. (505.629.037) dengan Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp. 446.000.00, total Jumlah Aset Sebesar Rp. 4.232.435.161.00.

Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.911.100,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp 281.717.500,- mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang jumlah barang 7 unit dengan nilai sebesar Rp 261.806.400,-.

BMN Tahun Anggaran 2021 terjadi Pengurangan disebabkan karena adanya reklasifikasi keluar perubahan kode barang dari 3080303004 (Scanner Assembly/counting system) menjadi 3100203004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 Unit sebesar Rp. 261.806.400,-

Adapun Kewajiban Jangka Pendek utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp. 11.636.000.00 adalah Hutang Uang Makan PNS KPU Kabupaten Padang Pariaman bulan Desember 2021 belum dibayarkan.

Realisasi belanja pegawai Rp. 1.299.871.244,-. Realisasi belanja barang Rp. 2.541.306.368,-. Realisasi Belanja Modal Rp. 24.268.500,- Surplus Defisit LO senilai (Rp. 3.948.392.464,-). Ekuitas Awal senilai Rp. 7.346.915.768,- dan Ekuitas Akhir senilai Rp. 4.718.661.860,-.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01//HK.03.2-Kpt/1305/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Darlis

Pejabat Pembuat Komitmen : Darlis

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Anisah

Bendahara Pengeluaran : Suci Prima Sari

Pengelola Keuangan : Floria

Pengelola Keuangan : Sritika Yanti

Adapun perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 24/HK.03.2-Kpt/1305/Sek-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01/HK.03.2-Kpt/1305/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 pada KPU Kabupaten Padang Pariaman tanggal 26 April 2021 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Darlis |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Feta Yuni Feria |
| Pejabat Penandatangan/Penguji SPM | : Anisah |
| Bendahara Pengeluaran | : Floria |
| Pengelola Keuangan | : Floria |
| Pengelola Keuangan | : Khairunas |

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga
 Eselon I
 Wilayah
 Satuan Kerja
 No. Dokumen
 Tanggal
 Tahun Anggaran
 Keterangan

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 : (01) Sekretariat Jenderal
 : Provinsi Sumatera Barat
 : KPU Kabupaten Padang Pariaman
 :
 : 31 Desember 2022
 : Tahun 2022
 :

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Pendapatan Diterima Di Muka
- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- Belanja Dibayar Di Muka
- Belanja Yang Masih Harus Dibayar
- Penyisihan Piutang
- Penghapusan Piutang
- Penyusutan Aset
- Kas Di Bendahara Penerimaan
- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- Persediaan

- Koreksi Antar Beban
- Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
- Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
- Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- Transfer Masuk
- Transfer Keluar
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Hibah Langsung

| No | D/K | Kode Akun | Uraian Nama Akun | Rupiah Debet | Rupiah Kredit |
|----|-----|-----------|--|--------------|---------------|
| 1 | D | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 11,636,000 | |
| | K | 212111 | Belanja pegawai yang masih harus dibayar | | 11,636,000 |
| | | | | | |

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Floria, S.Sos
 NIP. 19830924200701 2001

Tanggal : 31 Desember 2021

Disetujui oleh :



Darlis, S.Sos, MM
 NIP. 196805011998031004

Tanggal : 31 Desember 2021

Direkam oleh :
 Petugas Komputer



Floria, S.Sos
 NIP. 19830924200701 2001

Tanggal : 31 Desember 2021